

## PENGARUH ASPEK FISKAL DAN MONETER TERHADAP PDB SEKTOR PERTANIAN

Lukman Adam<sup>\*</sup>  
Iwan Hermawan<sup>\*\*</sup>

### **Abstract**

*A fact shows that many poor Indonesian farmers. Poverty can be seen from the narrow land ownership, the use of traditional tools and machines, and consumptive life styles. Poverty experienced by farmers can be done indirectly through macro-policy by seeking to achieve an adequate level of agricultural growth and reduce inflation. The estimation results show that government expenditure for the agricultural sector does not significantly influence gross domestic product in agriculture. While the money supply and the subsidy has positive influence on gross domestic product in agriculture. Taxes, interest rates and economic conditions negatively affect gross domestic product in agriculture.*

Kata Kunci: kebijakan makro ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, subsidi, pajak, tingkat suku bunga, dan PDB

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional di antaranya adalah penyerap tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap PDB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta mendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa menggantungkan perekonomian pada kegiatan ekonomi yang tidak

---

\* Kandidat Peneliti Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, P3DI, Setjen DPR RI, dapat dihubungi di: mada.kenn@gmail.com.

\*\* Kandidat Peneliti Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, P3DI, Setjen DPR RI, dapat dihubungi di: iwan.h@hotmail.com.

berbasis sumber daya ternyata sangat rentan terhadap guncangan dan dinamika lingkungan eksternal.

Tingginya kontribusi sektor pertanian tidak diikuti dengan kesejahteraan petani sebagai aktor utama penggerak sektor pertanian. Banyak faktor penyebab belum tercapainya kesejahteraan petani. Salah satunya adalah belum berpihaknya kebijakan pemerintah melalui kebijakan makro ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya suku bunga pinjaman, nilai tukar rupiah yang kurang mendukung sektor pertanian, masih diberlakukannya pajak ekspor terhadap komoditas pertanian serta rendahnya kredit dan investasi yang dialokasikan untuk sektor pertanian<sup>1</sup>.

Peminggiran terhadap sektor pertanian terutama pada tataran instrumen kebijakan, seperti pajak impor, nilai tukar rendah, dan bahkan kuota tertentu bagi industri *infant* telah mengakibatkan konsumen domestik, termasuk petani, harus membayar harga beli saprodi, seperti pupuk, alat dan mesin pertanian lebih mahal dari harga sebenarnya di tingkat internasional. Begitu juga dengan kebijakan makro ekonomi, seperti kredit perbankan tidak mendukung kegiatan sektor pertanian.<sup>2</sup>

Hal lain yang juga penting adalah harga input produksi yang sangat tinggi, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan input produksi, pemberian subsidi atau menekan tingkat suku bunga perbankan agar petani bisa mengembangkan usahanya melalui dana perbankan. Pemerintah saat ini telah memberikan subsidi bunga kredit untuk meringankan beban petani pada skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) serta penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun penyaluran kredit program tersebut masih sangat rendah (19 persen).

Saat ini sektor pertanian masih menghadapi banyak permasalahan, di antaranya keterbatasan petani dalam memperoleh modal, input pertanian, lahan, dan akses pasar. Padahal PDB sektor pertanian berdasarkan harga berlaku mempunyai peran sangat strategis. PDB sektor pertanian pada periode tahun 2000 – 2005 berada di peringkat ketiga sesudah industri

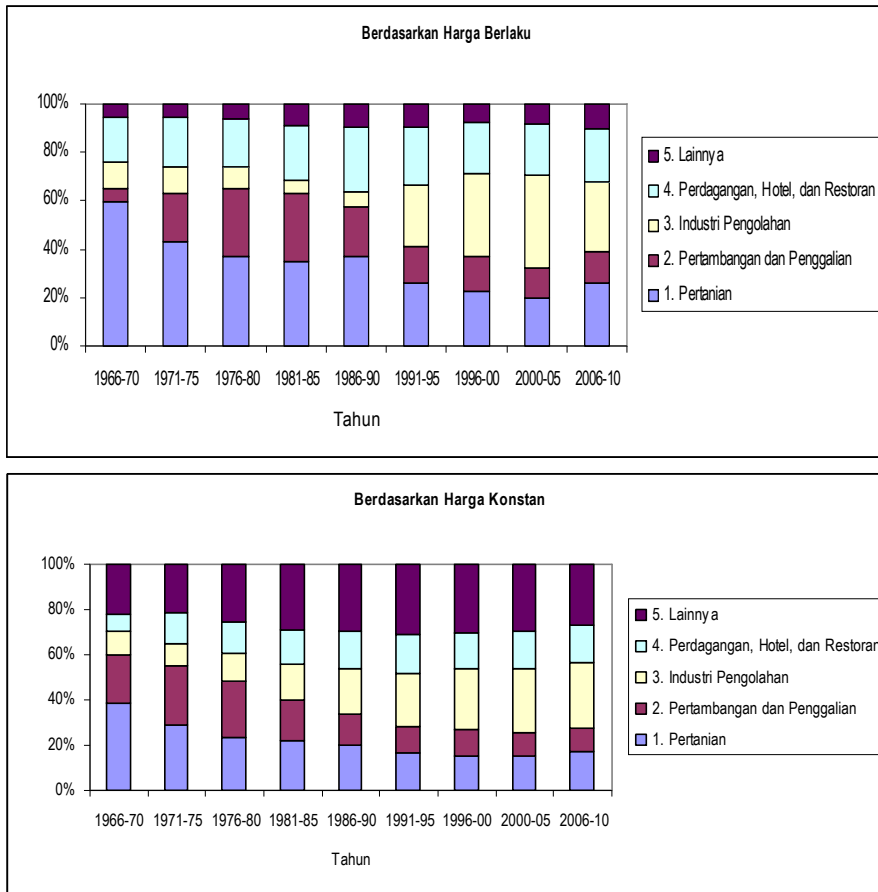
---

<sup>1</sup> Asnawi. 2005. *Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

<sup>2</sup> Arifin, B. 2004a. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta, hal. 15.

pengolahan dan perdagangan. Pada periode tahun 2006 – 2010, PDB sektor pertanian mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. PDB Menurut Sektor Ekonomi**



Sumber: BPS berbagai tahun.

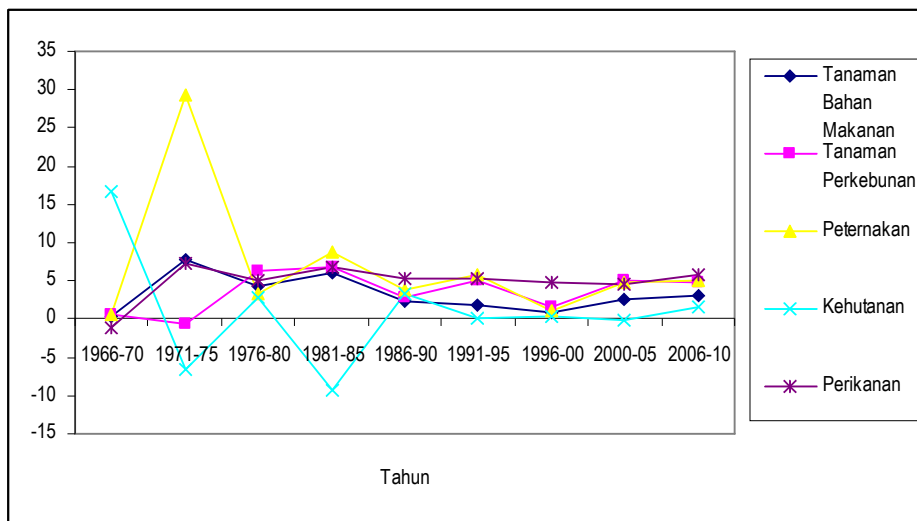
Apabila diperhatikan PDB berdasarkan harga konstan, terlihat bahwa PDB sektor pertanian hanya di atas sektor pertambangan dan penggalian. Todaro (2000)<sup>3</sup> menyebutkan bahwa penyebab utama semakin memburuknya kinerja sektor pertanian di negara-negara dunia ketiga

<sup>3</sup> Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga. Jakarta, hal. 383.

adalah terbaikannya sektor ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan itu sendiri. Terbaikannya sektor tersebut diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi pada perekonomian industri perkotaan, yang terutama sekali disebabkan oleh kesalahan dalam memilih strategi industrialisasi substitusi impor dan penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi.<sup>4</sup>

Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pangsa sektor pertanian mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhannya. Terlihat bahwa pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan hanya berada di atas sub sektor kehutanan, dan berada di bawah sub sektor perikanan dan sub sektor peternakan, seperti terlihat pada Gambar 2.

**Gambar 2. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian**

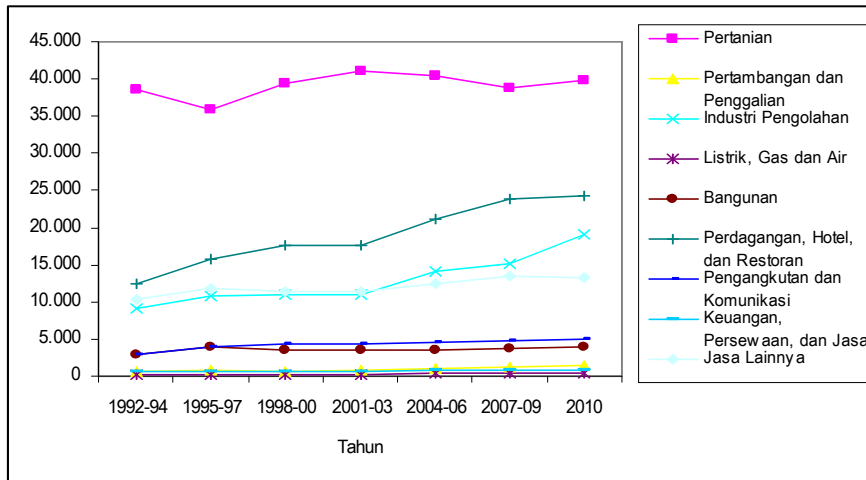


Sumber: BPS berbagai tahun.

Tingginya kontribusi PDB sektor pertanian tentunya diikuti dengan tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Hal ini dibuktikan dengan Gambar 3 bahwa tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sangat dominan dibandingkan sektor lainnya.

<sup>4</sup> *Ibid.*

**Gambar 3. Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi (dalam Ribu Orang)**



Sumber: BPS berbagai tahun.

Gambaran di atas menunjukkan betapa strategisnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penyedia lapangan kerja. Peran tersebut akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan, dan diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Untuk memperkuat posisi sektor pertanian, maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan suatu keharusan. Fungsi modal dalam tataran mikro ekonomi (usahatani), tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi, seperti benih bermutu, pupuk berimbang maupun teknologi pasca panen. Pada era teknologi pertanian yang semakin modern, pengerahan modal yang intensif, baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi, mungkin akan menjadi suatu keharusan. Bagi pelaku di sektor pertanian (terutama petani), situasi tersebut dapat memunculkan masalah karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri (Syukur *et al.*, 2000)<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Syukur, M., H. Mayrowani, Sunarsih, Y. Marisa, M. Fauzi Sutopo. 2000. *Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Daryanto (2009)<sup>6</sup> menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara *transforming countries* dicirikan dengan fakta bahwa sebagian besar petani menggarap kurang dari setengah hektar lahan dan hasil panen tradisional hanya menyediakan sedikit peluang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Strategi baru yang seyogyanya diadopsi adalah perubahan orientasi pembangunan pertanian yang selama ini terfokus pada tanaman bernilai rendah (*low-value commodities*) ke yang bernilai tinggi (*high-value commodities*), dari orientasi pasar domestik ke pasar internasional, dari pertanian *on farm* ke agribisnis dan agroindustri di perdesaan yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Kehidupan petani dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produktivitas yang membutuhkan investasi besar dalam perbaikan infrastruktur sektor pertanian, pengolahan lahan air, dan ketersediaan modal dalam keberlanjutan usaha. Ditambahkan oleh Daryanto (2009)<sup>7</sup>, bahwa semakin maju suatu negara (semakin tinggi pendapatan per kapita-nya), maka sumbangan relatif sektor agribisnis terhadap GDP juga semakin besar, sementara sumbangan relatif sektor pertanian terhadap GDP semakin kecil.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dihadapi oleh petani dapat dilakukan secara tidak langsung melalui kebijakan makro ekonomi dengan berusaha mencapai tingkat pertumbuhan pertanian yang memadai dan menekan inflasi (Samuelson dan Nordhaus, 1992)<sup>8</sup>. Yustika (2007)<sup>9</sup> menyebutkan bahwa proses komersialisasi sektor pertanian melalui serangkaian kebijakan yang berupaya antara lain meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian.

Setiap upaya komersialisasi sektor pertanian tidak harus akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, apabila sifat dari komersialisasi pasar meletakkan petani dalam posisi subordinat. Keuntungan ekonomi pertanian lebih banyak jatuh pada pemilik modal atau kelas pedagang yang relatif memiliki posisi tawar lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>6</sup> Daryanto, A. 2009. *Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatannya. Disampaikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*, Bogor, 14 Oktober 2009.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Samuelson, P. A. and W. D. Nordhaus. 1992. *Economics*. 14<sup>th</sup> edition. McGraw-Hill, Inc., New York, Pg. 135.

<sup>9</sup> Yustika, A. E. 2007. "Pedesaan, Pertanian, dan Modal: Tinjauan Ekonomi Kelembagaan". *Jurnal Ekonomi Indonesia*, No. 2 (Desember 2007), hal. 1 – 14.

dengan petani. Posisi pemilik modal (seperti tuan tanah, industri pengolahan, dan pedagang) yang relatif tinggi tersebut bukan hanya disebabkan oleh adanya penetrasi pasar, tetapi juga disumbangkan oleh karakteristik produk pertanian yang cepat rusak, sehingga petani tidak mungkin menahan produk tersebut untuk sementara waktu demi menaikkan harga. Persoalan ini sebenarnya bisa diatasi apabila terdapat fasilitas penyimpanan yang memungkinkan petani menimbun barang tanpa menimbulkan kerusakan, tetapi hal ini hampir mustahil bisa dilakukan karena petani tidak memiliki modal untuk membeli fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan skema kebijakan pembangunan sektor pertanian melalui kebijakan makro ekonomi berupa kebijakan moneter dan fiskal, misalnya tentang nilai tukar. Komoditas pertanian terutama yang berorientasi ekspor sangat diuntungkan dengan nilai tukar Rupiah rendah. Rendahnya nilai tukar juga mendongkrak harga-harga komoditas non-pertanian yang sangat dibutuhkan oleh petani, sehingga fenomena di atas makin memperlemah posisi petani, dan menurunkan daya beli masyarakat secara umum. Singkatnya, pembangunan sektor pertanian tidak akan mampu berkelanjutan apabila hanya terfokus pada peningkatan harga, tanpa diikuti perbaikan daya beli, pendapatan, dan akses informasi pasar yang menguntungkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Selama tiga dasawarsa, sektor pertanian adalah pengganda pendapatan paling efektif dalam pengentasan kemiskinan.<sup>10</sup> Upaya pemberantasan kemiskinan ini erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan disparitas di perdesaan, dan aliran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani, dalam bentuk peningkatan usahatani dan pemberian akses, termasuk di dalamnya akses informasi dan akses pasar dapat menjadi daya ungkit bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Faktor penyebab utama belum tercapainya tingkat kesejahteraan petani adalah masih belum memadainya prasarana pertanian, berbagai

---

<sup>10</sup> Arifin, B. 2004b. "Menterjemahkan Keberpihakan Terhadap Sektor Pertanian: Suatu Telaah Ekonomi Politik" *dalam* "Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian: Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan". Perhepi, hal. 69.

hambatan pengembangan usaha tani, dan harga input yang tinggi serta harga hasil produksi yang rendah dari harapan petani. Prasarana pertanian yang menunjang seperti jalan, saluran irigasi, pasar, dan pergudangan masih menjadi kendala dalam berusaha tani. Jaringan irigasi teknis dan jaringan irigasi perdesaan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Prasarana usahatani lainnya yang sangat dibutuhkan oleh petani, namun keberadaannya sangat terbatas antara lain jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan gudang berpendingin, laboratorium uji standar mutu, dan terminal serta sub terminal agribisnis. Prasarana pertanian ini utamanya dipersiapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pertanian. Menurut Darsono, *et al* (2008)<sup>11</sup>, instrumen kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang paling kuat mempengaruhi kinerja sektor pertanian dan agroindustri salah satunya adalah anggaran sektor pertanian.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh petani adalah hambatan pengembangan usaha tani. Dalam berusaha tani, petani memerlukan input produksi berupa benih, pupuk, dan bahan pengendali organisme pengganggu tanaman, serta alat dan mesin pertanian. Namun yang terjadi adalah petani mengalami kesulitan memperoleh input produksi tersebut karena tidak tersedia atau harganya yang sangat tinggi.

Selain permasalahan pokok di atas, harga hasil produksi yang tidak sesuai harapan juga merupakan permasalahan penting. Harga tentunya terkait dengan inflasi. Ada tiga penyebab inflasi, salah satunya yang sering terjadi dalam produk pertanian adalah inflasi akibat pengaruh moneter. Inflasi ini disebabkan peningkatan volume uang yang sangat tinggi dan tidak proporsional dengan barang dan jasa yang semakin meningkat. Meskipun Bank Indonesia sudah melakukan berbagai instrumen moneter, namun dampaknya belum maksimal seperti terlihat dari kenaikan harga barang. Di samping itu, defisit transaksi berjalan juga mendorong peningkatan

---

<sup>11</sup> Darsono, M. Tambunan, H. Siregar, dan D.S. Priyarsono. 2008. "Analisis Keefektifan Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan Penekanan Agroindustri di Indonesia". *Forum Pascasarjana IPB*. Bogor. Vol. 31, No. 3 (Juli, 2008), hal. 2001-2014.

pasokan uang.<sup>12</sup> Dengan tiga permasalahan pokok tersebut, maka kajian ini menganalisis pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap PDB sektor pertanian.

### C. Kerangka Teori

#### 1. Kebijakan Makro Ekonomi

Di negara manapun juga, baik yang beraliran sosial maupun berbasis kapitalis atau gabungan dari dua sistem ekonomi tersebut, pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam ekonomi. Walaupun dalam prakteknya, banyak negara melakukan intervensi sangat luas, bahkan menguasai atau memonopoli ekonomi, seperti di China (walaupun sekarang sudah jauh berkurang dibandingkan 20 tahun silam), Korea Utara, Myanmar, dan Kuba, di mana jumlah perusahaan milik negara (BUMN) jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan swasta.<sup>13</sup> Pada prinsipnya tugas pemerintah di dalam ekonomi hanyalah sebagai stabilisator, fasilitator, stimulator, dan regulator, sedangkan pelaku ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Tugas pemerintah ini direalisasikan lewat berbagai macam kebijakan, melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mendorong atau menggairahkan ekonomi pada saat ekonomi sedang lesu dan mengerem laju ekonomi pada saat sedang memanas (*over heating*), terutama untuk mencegah inflasi yang tinggi. Dalam kata lain, tugas pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat tertentu yang menciptakan kesempatan kerja penuh, yang artinya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan ekonomi makro ekonomi secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil menghasilkan barang dan jasa; disebut juga sisi produksi dari ekonomi. Sektor ini dapat dibagi menurut kelompok kegiatan

---

<sup>12</sup> Amang, B. dan M. H. Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*. Edisi Kedua: direvisi dan diperluas. Penerbit IPB Press. Bogor, hal. 202.

<sup>13</sup> Sefrarita, C. 2005. *Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. Sumatera Utara.

atau subsektor seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Sedangkan, sektor moneter dapat dikatakan merupakan hasil dari sektor riil dalam bentuk uang, atau sisi moneter dari ekonomi. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di Indonesia kebijakan ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank Indonesia. Kereserasian antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena akan menciptakan suatu stabilitas ekonomi.

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mempunyai dua tujuan, yakni menstimulasi pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi dengan cara menaikkan atau mengurangi pengeluaran pemerintah ( $G=Government\ Expenditure$ ) dan/ atau mengurangi atau menaikkan tarif pajak ( $T=Tax$ ). Kebijakan fiskal termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah dan instrument pajak. Efek dari kebijakan fiskal terhadap ekonomi terdiri dari efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek adalah efek awal atau langsung dari kebijakan itu sendiri, sedangkan efek jangka panjang adalah efek awal ditambah efek-efek selanjutnya atau disebut efek pengganda (*multiplier*) dari kebijakan tersebut. Misalnya, pemerintah mengurangi subsidi BBM, yang merupakan salah satu komponen dari pengeluaran rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka efek awalnya adalah  $G$  berkurang yang membuat pendapatan atau PDB berkurang. Sedangkan efek jangka panjangnya adalah akibat PDB menurun, maka konsumsi juga berkurang yang selanjutnya membuat penurunan PDB lebih besar lagi.

Jika ekonomi sedang lesu, yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDB yang menurun atau negatif, maka pemerintah berkewajiban sesuai fungsinya memberi insentif agar pertumbuhan kembali meningkat. Untuk tujuan tersebut, pemerintah lewat kebijakan fiskal punya dua opsi, yaitu menaikkan pengeluaran dan/atau mengurangi tarif pajak. Ini yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ekspansif. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif adalah mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan pajak lewat kenaikan tarif pajak.

Kebijakan fiskal ekspansif juga bisa mengakibatkan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh peningkatan permintaan kredit yang didorong oleh kenaikan pendapatan. Jika kenaikan suku bunga terlalu tinggi akan

berdampak negatif terhadap pertumbuhan investasi di dalam negeri. Apabila nilai pendapatan atau penurunan laju pertumbuhan PDB akibat penurunan investasi sama besarnya dengan nilai pendapatan yang meningkat karena peningkatan pengeluaran pemerintah, maka efek dari kebijakan fiskal tersebut menjadi nol, atau telah menimbulkan efek *crowding-out*.

Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama, yaitu (1) kebijakan pajak dan (2) pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2003)<sup>14</sup>. Menurut Sudiyono (1985)<sup>15</sup>, variabel instrumen kebijakan fiskal dapat berbentuk pajak, transfer pemerintah, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal atau penganggaran memiliki tiga fungsi: (1) fungsi alokasi, (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang-barang sosial, dan kombinasi dari barang-barang sosial yang telah dipilih. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

### 3. Subsidi

Subsidi merupakan pembayaran dari pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memproduksi atau mengkonsumsi produk dalam jumlah yang lebih besar atau dengan harga yang lebih murah. Ada dua jenis subsidi pemerintah, yaitu transfer dalam bentuk tunai dan subsidi. Transfer tunai diberikan kepada konsumen sebagai pendapatan tambahan atau jika uang ini diberikan kepada produsen, maka diharapkan harga produk bisa lebih rendah. Subsidi dalam bentuk pengeluaran pemerintah adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan harga yang terjangkau. Selain itu, subsidi diberikan kepada produsen untuk memproduksi kebutuhan dasar dalam bentuk barang

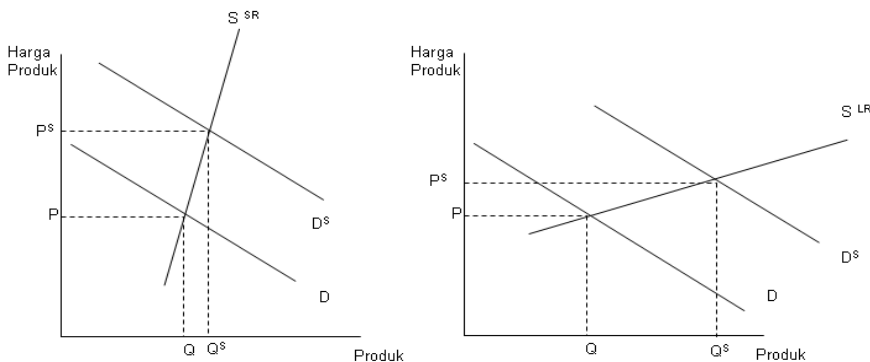
---

<sup>14</sup> Mankiw, G. 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta, hal. 85.

<sup>15</sup> Soediyono 1985. *Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan Agregatif*. Liberty. Yogyakarta, hal. 71.

dengan jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Subsidi ditujukan untuk menstabilkan ekonomi, khususnya stabilitas harga. Subsidi adalah transfer pembayaran dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk dari redistribusi kesejahteraan. Redistribusi kesejahteraan adalah dasar dari subsidi. Efek dari subsidi pemerintah, khususnya produk pertanian, ditunjukkan pada Gambar 4.

**Gambar 4. Dampak Subsidi terhadap Produksi Pertanian**



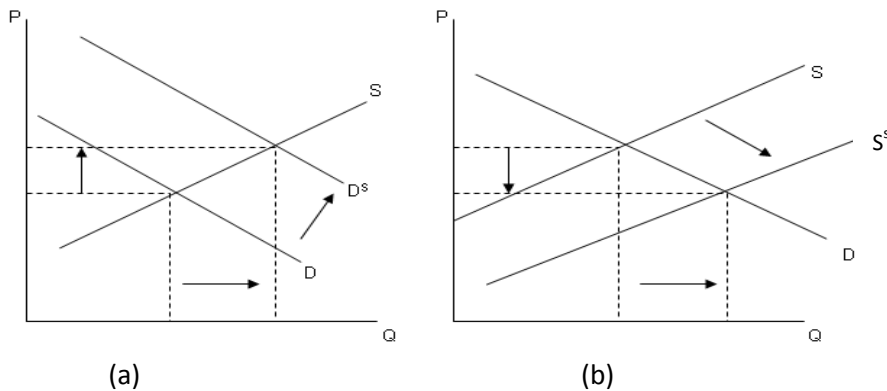
Keterangan: *SR = short run*  
*LR = long run*

Kurva persediaan produk pertanian dalam jangka pendek (SR) diasumsikan inelastis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 (a). Jika pemerintah memberikan subsidi untuk produk pertanian, maka dampaknya adalah pada permintaan produk, sebagai contoh, kurva permintaan bergeser ke kanan atas. Meningkatnya permintaan menghasilkan peningkatan harga akan tetapi petani tidak bisa meningkatkan produksinya. Akan tetapi, pada jangka panjang (LR), subsidi pada produksi pertanian membuat peningkatan pada jumlah penawaran, dikarenakan pada jangka panjang kurva penawaran lebih elastis sebagaimana diilustrasikan pada panel (b), Gambar 5.

Pengaruh subsidi pada konsumsi dan produksi dapat dianalisis dengan memperhatikan kurva permintaan sebagaimana kurva penawaran. Subsidi menggeser kurva permintaan ke kanan dan ke atas sebagai pergeseran ke kanan dan ke bawah untuk kurva penawaran barang-barang yang disubsidi. Hasil dari kedua subsidi ini adalah keseimbangan baru yang lebih besar pada jumlah barang. Pengaruh dari dua subsidi tersebut dalam permintaan dan penawaran ditunjukkan pada Gambar 5. Pada Gambar 5

(a), subsidi konsumsi menggeser kurva permintaan  $D$  menjadi  $D^s$ . Sementara pada Gambar 5 (b), subsidi pada produksi menggeser kurva penawaran  $S$  menjadi  $S^s$ .

**Gambar 5. Pengaruh Subsidi terhadap Penawaran dan Permintaan**



#### 4. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan penting dalam perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin pada kemampuannya mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini akan menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter.

Idealnya, sasaran tersebut dapat dicapai secara bersamaan. Namun, seringkali pencapaian sasaran akhir tersebut mengandung unsur-unsur yang kontradiktif (Acarya, 2002)<sup>16</sup>. Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja umumnya dapat berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Sementara dalam jangka panjang, kebijakan moneter bersifat netral dan hanya dapat mempengaruhi harga.

Kebijakan moneter yang penting dilakukan adalah pengendalian jumlah uang beredar yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan inflasi, serta pengendalian kestabilan neraca pembayaran. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu rendah, walaupun akan menurunkan inflasi dan defisit transaksi berjalan secara

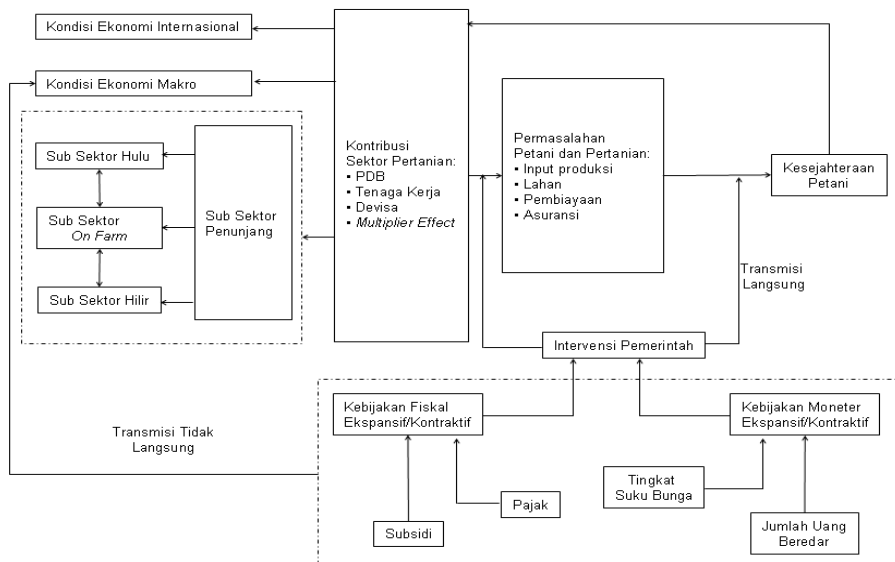
<sup>16</sup> Acarya. 2002. *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Jakarta, hal. 36.

signifikan, akan tetapi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang agak rendah. Sebaliknya, pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu tinggi dapat mendorong perekonomian tinggi, tetapi akan menghasilkan inflasi dan defisit transaksi berjalan yang juga meningkat.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi petani perlu dilakukan keberpihakan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter yang terkait adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, dan subsidi sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Asnawi (2005)<sup>17</sup> dalam penelitiannya mengenai dampak kebijakan makro ekonomi terhadap kinerja sektor pertanian yang menyarankan untuk mendisagregasi: 1) sektor non-pertanian, 2) tenaga kerja di sektor pertanian, 3) upah tenaga kerja, 4) modal, 5) penerimaan pajak ekspor dan tarif impor, dan 6) pengeluaran pemerintah. Lebih lengkapnya mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6.

**Gambar 6. Diagram Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis, 2011.

<sup>17</sup> Asnawi, *loc. cit.*

Kebijakan makro ekonomi berupa kebijakan moneter dan fiskal wajib terintegrasi dengan skema kebijakan pembangunan pertanian, misalnya tentang nilai tukar. Komoditas pertanian terutama yang berorientasi ekspor sangat diuntungkan dengan rendahnya nilai tukar Rupiah. Rendahnya nilai tukar juga mendongkrak harga-harga komoditas non pertanian yang sangat dibutuhkan oleh petani, sehingga fenomena di atas makin memperlemah posisi petani, dan menurunkan daya beli masyarakat secara umum. Singkatnya, pembangunan sektor pertanian tidak akan mampu berkelanjutan apabila hanya terfokus pada peningkatan harga, tanpa diikuti perbaikan daya beli, pendapatan, dan akses informasi pasar yang menguntungkan.

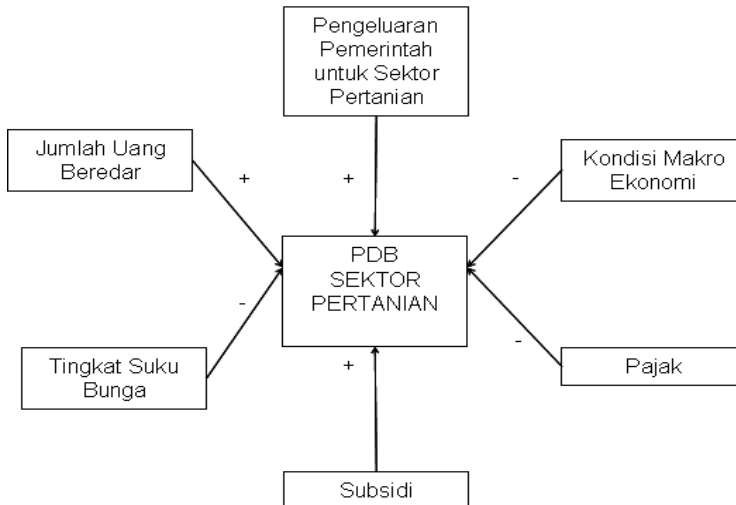
Arifin (2004a)<sup>18</sup> menambahkan bahwa dalam hal tingkat suku bunga, sektor pertanian harus memperoleh tingkat suku bunga yang layak dan terjangkau bagi sebagian besar petani dan pelaku usaha agribisnis. Laju inflasi yang rendah semestinya menurunkan tingkat keragaman suku bunga yang dihadapi komoditas pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian seharusnya tertolong oleh laju inflasi yang rendah. Namun, hambatan besar sektor pertanian karena kecilnya anggaran pemerintah tidak akan banyak tertolong oleh rendahnya laju inflasi tersebut karena komoditas pertanian amat tergantung dari sarana dan prasarana publik, seperti kualitas jalan, irigasi, riset dan sistem informasi.

## **E. Hipotesis**

1. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, dan peningkatan subsidi berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian.
2. Peningkatan pajak, kenaikan tingkat suku bunga, dan kondisi perekonomian berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian.

---

<sup>18</sup> Arifin, B, 2004a. *op. cit.*

**Gambar 7. Hipotesis Penelitian**

Sumber: Penulis, 2011.

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan oleh Yusdja, *et al.* (2004)<sup>19</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika petani bersedia melakukan manajemen bersama, mereka dapat saling menutupi kekurangan atau kelebihan masing-masing, sehingga mempunyai peluang memperoleh keuntungan tambahan lebih dari 50 persen dari yang biasa mereka peroleh tanpa tambahan modal, bahkan lebih hemat sebesar 30 persen karena adanya pengurangan penggunaan pupuk lebih dari 50 persen.

Kebijakan harga pangan baik jangka pendek maupun jangka panjang merupakan kebijakan harga input-output yang menyebabkan PDB berkontraksi dan inflasi, namun tidak menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Walaupun menyebabkan kontraksi ekonomi dan inflasi, kebijakan harga pangan secara relatif tidak menyebabkan instabilitas makro ekonomi dibandingkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut

<sup>19</sup> Yusdja, Y., E. Basuno, M. Ariani, dan T. B. Purwantini. 2004. "Analisis Peluang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Petani Melalui Pengelolaan Usahatani Bersama". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 22 No. 1, (Mei 2004), hal. 1 – 25.

awalnya meningkatkan inflasi, namun pada triwulan kedua setelah diterapkan, kebijakan tersebut mampu menurunkan inflasi. Penurunan inflasi tersebut menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi sehingga meningkatkan angka pengangguran<sup>20</sup>.

Dari hasil perhitungan program matematika, yang juga dilakukan oleh Yusdja *et al.* (2004)<sup>21</sup>, memperlihatkan bahwa sebagian besar petani menghadapi keterbatasan utama, yaitu modal sehingga mereka tidak bisa menggunakan faktor produksi secara penuh. Jika petani mendapat tambahan biaya sekitar 5 – 15 persen dari biaya yang biasa dikeluarkan, maka usaha petani akan dapat meningkatkan kesempatan kerja sebesar 10 sampai 30 persen dengan kenaikan keuntungan sebesar 20 sampai 40 persen dan peningkatan produksi antara 20 sampai 40 persen dibandingkan keadaan semula. Permasalahan terkait dengan modal bisa diatasi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian.

Perubahan kebijakan proteksi berupa peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen untuk bawang merah dan jeruk, berpotensi meningkatkan harga grosir, harga petani, produksi, dan surplus produsen, tetapi menurunkan jumlah impor, jumlah permintaan, surplus konsumen, penerimaan pemerintah dari pajak impor, dan surplus ekonomi *netto* dalam jumlah besar. Pada skala mikro usahatani, peningkatan tarif impor berpotensi meningkatkan pendapatan bersih usahatani bawang merah dan jeruk.<sup>22</sup> Selain itu, Saptana dan Hadi (2008) juga menyimpulkan bahwa kebijakan proteksi berupa peningkatan tarif impor berupa pemberian subsidi perlu dilanjutkan karena mempunyai dampak positif bagi perkembangan produksi dan pendapatan petani. Namun, karena dampak negatif yang terlalu besar pada tingkat makro ekonomi nasional, maka peningkatan tarif impor menjadi 25 persen dinilai terlalu tinggi.

Salah satu persoalan pelik yang dihadapi sektor pertanian adalah realitas kelangkaan modal akibat struktur petani di Indonesia yang

---

<sup>20</sup> Ilham, N., dan H. Siregar. 2007. "Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 25 No. 1, (Mei 2007), hal. 55 – 83.

<sup>21</sup> Yusdja, *et al*, 2004, *op cit*.

<sup>22</sup> Saptana dan P. U. Hadi. 2008. "Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi dan Promosi Terhadap Ekonomi Hortikultura Indonesia". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 26 No. 1, (Mei 2008), hal. 21 – 46.

didominasi oleh petani kecil (rata-rata memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar).<sup>23</sup> Ashari (2009)<sup>24</sup> dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa kredit program ataupun bantuan modal ke petani dianggap sebagai instrumen kebijakan yang strategis. Namun implementasinya menunjukkan bahwa kredit atau bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau dari hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk upaya menyalurkan kredit program melalui perbankan dengan sistem subsidi bunga maupun penanggungungan sebagian resiko masih belum optimal. Pemerintah juga cenderung membuat semacam penyeragaman perlakuan, tidak melakukan identifikasi secara cermat terhadap kondisi sasaran.

Asnawi (2005)<sup>25</sup> dalam penelitiannya menggunakan sistem persamaan simultan yang memasukkan variabel kebijakan makro ekonomi dan didisagregasi ke dalam sektor dan sub sektor ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model makro ekonomi Indonesia yang dibangun mampu menjelaskan dengan baik adanya keterkaitan berbagai sektor perekonomian Indonesia dan kaitannya dengan sektor pertanian. Kebijakan makro ekonomi: 1) depresiasi nilai tukar Rupiah, 2) peningkatan kredit di sektor pertanian, 3) peningkatan investasi di sektor pertanian, 4) kombinasi penurunan tingkat suku bunga dan peningkatan kredit di sektor pertanian, dan 5) kombinasi kebijakan 1, 3, dan 4 pada peramalan periode tahun 2003 - 2007 dapat meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia dan meningkatkan kinerja sektor pertanian.

### III. Metodologi

#### A. Model Analisis

Untuk mengidentifikasi pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap PDB Indonesia, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Variabel terikat dalam kajian ini adalah PDB Indonesia di sektor pertanian, variabel bebasnya adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian (GA), jumlah uang beredar (Ms), Pajak (Te), tingkat suku bunga (Er), dan subsidi (S). Dalam kajian ini akan dilihat

---

<sup>23</sup> Yustika, *loc. cit.*

<sup>24</sup> Ashari. 2009. "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia". *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 7 No. 1, (Maret 2009), hal. 21 – 42.

<sup>25</sup> Asnawi, *loc. cit.*

seberapa besar pengaruh kebijakan ekonomi pemerintah terhadap PDB Indonesia di sektor pertanian dengan fungsi matematis sebagai berikut:

$$PDB = f(GA, Ms, Te, Er, S, Dm) \dots\dots\dots (3.1.)$$

Sehingga spesifikasi model yang akan dijadikan sebagai model penelitian sebagai berikut:

$$\text{Log PDB} = a_0 + a_1 \log GA + a_2 \log Ms + a_3 \log Te + a_4 \log Er + a_5 \log S + a_6 Dm + \mu \dots\dots\dots (3.2.)$$

dimana:

PDB	=	Produk Domestik Bruto Indonesia di sektor pertanian (Rp)
GA	=	Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian (Rp)
Ms	=	Jumlah uang beredar (Rp)
Te	=	Pajak (Rp)
Er	=	Tingkat suku bunga (%)
S	=	Subsidi (Rp)
Dm	=	<i>Dummy</i> variabel
$a_0 \dots a_6$	=	<i>Intercept</i> (konstanta)
$\mu$	=	Galat <i>error</i>

## B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka sebagai alat analisis yang digunakan adalah Program SAS versi 9.0.

## C. Uji Kesesuaian

1.  $R^2$  (*coefficient determinant*), untuk melihat kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat.
2. *Overall test* (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika  $F_{hit} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
3. *Partial test* (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Jika  $t_{hit} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi terkait, seperti Departemen Pertanian, BPS dan sumber-sumber lainnya, berupa jurnal dan hasil penelitian. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, pajak, tingkat suku bunga, subsidi, dan PDB Indonesia untuk sektor pertanian.

### IV. Pembahasan

#### A. Uji Kesesuaian (*Goodness of Fit*)

Untuk pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam kajian ini, maka dilakukan estimasi dengan model *Ordinary Least Square* (OLS) untuk data *time series* 15 tahun, yaitu tahun 1995 - 2009.

##### a. Model Ekonomi

**Tabel 1. Hasil Estimasi Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter terhadap PDB Sektor Pertanian**

LOG PE	=	10,331	+	0,006 LOG GA	+	0,021 LOG MS	-	0,260 LOG TE	-	0,050 LOG ER	+	0,030 LOG S	-	0,138DM
Std.Er.	:			(0,029)		(0,027)		(0,032)		(0,024)		(0,013)		(0,014)
t-stat	:			(0,829)**		(0,810)**		(8,128)***		(2,052)*		(0,711)*		(-9,554)***
R2	:	0,9954		F-stat	:	562,652***								
				Prob	:	0,000								

*Keterangan:* \* = signifikan pada tingkat 10 persen.

\*\* = signifikan pada tingkat 5 persen.

\*\*\* = signifikan pada tingkat 1 persen.

Dari masing-masing variabel *dependent* (variabel terikat) dan variabel *independent* (variabel bebas) yang disertakan dalam model estimasi di atas, diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,9954 yang berarti secara keseluruhan variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, pajak, tingkat suku bunga, dan subsidi mampu menjelaskan variasi PDB sektor pertanian sebesar 99,54 persen selama kurun waktu yang diteliti. Sedangkan sisanya sebesar 0,46 persen, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

Bila dilihat secara bersama-sama dari masing-masing variabel bebasnya berarti pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, pajak, tingkat suku bunga, dan subsidi mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDB sektor pertanian pada tingkat keyakinan 99 persen. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-statistik sebesar  $562,652 > F$  tabel sebesar 4,69 pada  $\alpha$  1 %.

Berdasarkan uji t-statistik, dapat diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga, pajak dan *dummy* variabel kondisi perekonomian berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian, sedangkan jumlah uang beredar dan subsidi tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian Simorangkir dan Adamanti (2010)<sup>26</sup> menyatakan bahwa dari sisi PDB, kebijakan fiskal dan moneter gabungan memberikan efek pengganda yang signifikan untuk mendorong permintaan agregat melalui peningkatan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor/impor. Berdasarkan sektor, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif meningkatkan produksi di semua sektor ekonomi melalui insentif fiskal (pemotongan pajak, bea masuk rendah, dan lain-lain) yang mendorong sektor usaha untuk meningkatkan investasi. Selain itu, permintaan agregat juga mendorong sektor usaha untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi permintaan tersebut. Dari sisi institusi, pajak yang lebih rendah dan subsidi yang meningkat maka akan mengangkat pendapatan rumah tangga dan juga daya beli rumah tangga. Selain itu pendapatan yang lebih tinggi mendukung konsumsi rumah tangga yang lebih besar. Dalam hal anggaran pemerintah, kombinasi dari kebijakan fiskal dan moneter ekspansif menambah defisit fiskal akibat penurunan pendapatan dari pajak (pajak penghasilan, PPN, bea impor) dan pengeluaran pemerintah. Namun, defisit fiskal masih berada di bawah ambang batas maksimum -3%.

#### **b. Pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini

---

<sup>26</sup> Simorangkir, I., dan J. Adamanti. 2010. "Peran Stimulus Fiskal dan Pelonggaran Moneter pada Perekonomian Indonesia Selama Krisis Finansial Global: Dengan Pendekatan *Financial Computable General Equilibrium*". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Oktober 2010.

berarti bahwa semakin meningkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, maka PDB sektor pertanian akan semakin meningkat. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian sebesar 0,006 berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian sebesar 1 persen, menyebabkan PDB sektor pertanian meningkat 0,006 persen, *ceteris paribus*. Dilihat dari nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari satu, pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian bersifat inelastis terhadap perkembangan ekonomi. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 0,829 yang lebih kecil dibandingkan t-tabel ( $\alpha$  10 % = 1,761). Hal ini berarti bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

Hal ini diduga berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang dimulai sekitar bulan April dan Agustus sampai bulan Oktober dan Desember setiap tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan belum secara langsung memberikan pengaruh terhadap PDB sektor pertanian. Selain itu, pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah sebagian merupakan pembangunan yang bersifat stimulus, yaitu pelaksanaan pembangunan tersebut akan merangsang aktifitas perekonomian di suatu wilayah. Sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan waktu untuk dapat meningkatkan PDB sektor pertanian.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian bertujuan agar roda perekonomian dapat berkembang dengan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah secara langsung dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah dan memberikan efek pengganda.

Wijaya (2000)<sup>27</sup> mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*), karena kenaikan permintaan agregatif

---

<sup>27</sup> Wijaya, M. F. 2000. *Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro*. Edisi 3. Penerbit BPFE. Yogyakarta, hal. 56.

didasarkan pada asumsi bahwa pengeluaran pemerintah bukan pada proyek-proyek yang menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta. Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah sebenarnya bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat dan memudahkan bagi investor dalam melakukan investasi.

Oleh karena itu, investasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan investasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi memberikan sarana dan prasarana bagi kelancaran investasi oleh pihak swasta. Investasi pihak swasta yang secara langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat akan dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang cukup lama kepada masyarakat.

Yusdja, *et al* (2004)<sup>28</sup> merekomendasikan dimana pemerintah perlu merubah cara pendekatan terhadap petani dengan lebih memperhatikan perbedaan spesifik di antara petani. Menyamaratakan petani dalam program-program peningkatan produksi pangan tidak akan memberikan hasil yang baik. Untuk menyukseskan program ini dituntut peran pemerintah yang lebih besar dalam bidang penyuluhan dan pemberian subsidi saprodi (pupuk) kepada petani. Usaha ini akan memacu pertumbuhan produksi pertanian, membuka kesempatan kerja yang lebih besar, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Onoja dan Agumagu (2009)<sup>29</sup> yang meneliti keragaan kinerja ekonomi sub sektor bahan makanan yang berkaitan dengan beberapa kebijakan makro ekonomi pemerintah, seperti pengeluaran agregat sektor pertanian, pinjaman dari bank-bank komersial ke sektor pertanian, dan skema jaminan kredit pertanian di Nigeria. Rekomendasi dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah Nigeria perlu meningkatkan porsi persentase pengeluaran sektor pertanian dalam APBN jika ingin mencapai pertumbuhan sub sektor bahan makanan yang signifikan dan peningkatan ekonomi dalam sektor pertanian.

---

<sup>28</sup> Yusdja, Y., E. Basuno, *et. al.*, *loc. cit.*

<sup>29</sup> Onoja, A. O., and Agumagu A. C. 2009. "Econometric Modeling of The Effects of Economic Policies on Food Output in Nigeria Under Obasanjo's Administration". *Journal of Sustainable Development in Africa*. 11 (1). Pp. 98 – 112.

### c. Jumlah uang beredar

Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat jumlah uang beredar, maka PDB sektor pertanian akan semakin meningkat. Koefisien regresi jumlah uang beredar sebesar 0,021 berarti bahwa setiap peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1 persen, menyebabkan PDB sektor pertanian meningkat 0,021 persen, *ceteris paribus*.

Dilihat dari nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari satu, jumlah uang beredar bersifat inelastis terhadap perkembangan ekonomi. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 0,810 yang lebih kecil dibandingkan t-tabel ( $\alpha$  10 % = 1,761). Hal ini berarti bahwa variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis Keynes, bahwa penawaran uang (*money supply*) berpengaruh positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga. Kondisi ini akan mendorong investor untuk melakukan investasi, yang akan menciptakan kenaikan *output* dan memicu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, permintaan uang akan memiliki hubungan negatif terhadap *output*, meningkatnya permintaan uang akan berdampak pada peningkatan tingkat suku bunga, dan akhirnya berakibat pada penurunan *output*.

### d. Pajak

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat pajak, maka PDB sektor pertanian akan semakin menurun. Koefisien regresi pajak sebesar 0,26 berarti peningkatan pajak sebesar 1 persen, akan menyebabkan PDB sektor pertanian menurun 0,26 persen, *ceteris paribus*. Dilihat dari nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari satu, pajak bersifat inelastis terhadap perkembangan ekonomi. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 8,128 yang lebih besar dibandingkan t-tabel ( $\alpha$  1 % = 2,977). Hal ini berarti bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

Hasil simulasi yang dilakukan oleh Maipita, *et al* (2010)<sup>30</sup> menunjukkan secara agregat, peningkatan pajak tidak langsung pada rumah tangga di pedesaan memiliki dampak negatif pada kinerja makro ekonomi. Peningkatan pajak tidak langsung telah menggabungkan beberapa dampak pada sektor yang bervariasi dan kelompok rumah tangga. Utilitas rumah tangga antar usaha dan tenaga kerja sektor pertanian pedesaan telah meningkat sebagai hasil dari peningkatan pajak tidak langsung. Tapi, kelompok rumah tangga lain menunjukkan penurunan utilitas.

#### e. Tingkat Suku Bunga

Hasil estimasi menunjukkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya tingkat suku bunga, maka PDB sektor pertanian akan semakin menurun. Nilai koefisien regresi suku bunga sebesar 0,05 berarti bahwa setiap peningkatan suku bunga sebesar 1 persen, menyebabkan PDB sektor pertanian menurun 0,05 persen, *ceteris paribus*. Tingkat suku bunga bersifat inelastis terhadap perkembangan ekonomi. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 2,052 yang lebih besar dibandingkan t-tabel ( $\alpha$  10 % = 1,761). Hal ini berarti bahwa variabel tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

Ashari (2009)<sup>31</sup> menyebutkan bahwa program pemerintah dalam membantu pembiayaan di sektor pertanian secara umum diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu 1) bantuan secara langsung (*grant*) dan bersifat bergulir. Pada jenis ini tidak ada kewajiban secara tegas untuk mengembalikan, baik pokok maupun bunga, dan 2) kredit komersial dengan bantuan subsidi bunga oleh pemerintah. Pada jenis pertama kelebihanannya adalah petani benar-benar dibantu modal secara penuh tanpa ada beban resiko untuk mengembalikan hutang sehingga mereka lebih tenang dalam berusahatani. Selain itu, jika dikelola dengan baik oleh kelompok tani ada potensi yang besar bagi petani/kelompok tani untuk pembentukan modal (*capital formation*) sehingga mereka bisa mandiri dan tidak lagi

---

<sup>30</sup> Maipita, I., M.D. Jantan, dan N.A.A. Razak. 2010. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, April 2010.

<sup>31</sup> Ashari. 2009. "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia". *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 7 No. 1, (Maret 2009), hal. 21 – 42.

memerlukan bantuan modal di masa mendatang. Bahkan dengan manajemen yang profesional kelompok tani yang awalnya mendapat bantuan *grant* dapat membentuk lembaga keuangan mikro di tingkat pedesaan yang dapat menyediakan dana secara kontinyu bagi usaha perekonomian di pedesaan.

Namun, bantuan modal dengan *grant* ini juga sarat dengan kelemahan-kelemahan, seperti 1) kurang mendidik petani untuk lebih bertanggung jawab dan berperilaku profesional dalam penggunaan dana masyarakat; 2) peluang terjadinya *moral hazard* sangat besar; 3) kontinuitas pelaksanaan sangat tergantung dengan keberadaan suatu kegiatan sehingga ketika kegiatan berakhir program juga terhenti; 4) *reward and punishment* sangat lemah; dan 5) sangat membebani anggaran pemerintah dengan output yang tidak terukur secara jelas.

Anthony (2010)<sup>32</sup> yang melakukan penelitian mengenai dampak kredit pertanian terhadap pertumbuhan PDB di Nigeria dengan menggunakan estimasi model persamaan kredit sektor pertanian menunjukkan nilai tukar dan suku bunga mempengaruhi output agregat di Nigeria. Hasil simulasi historis menunjukkan bahwa model makro-ekonometrika dalam penelitian tersebut memberikan representasi yang memadai dan akurat terhadap perkembangan ekonomi Nigeria. Sedangkan rekomendasi hasil penelitian Onoja dan Agumagu (2009)<sup>33</sup> menyebutkan bahwa pemerintah Nigeria harus mengupayakan agar Bank Sentral Nigeria menurunkan atau mensubsidi suku bunga kredit sektor pertanian sehingga kredit sektor pertanian dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan output bahan makanan.

#### **f. Subsidi**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa subsidi berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat subsidi, maka PDB sektor pertanian akan semakin meningkat. Koefisien regresi subsidi sebesar 0,030 berarti bahwa setiap peningkatan subsidi

---

<sup>32</sup> Anthony, E. 2010. "Agricultural Credit and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Analysis". *Business and Economics Journal*, Volume 2010.

<sup>33</sup> Onoja, A. O., and Agumagu A. C., *loc. cit.*

sebesar 1 persen, menyebabkan PDB sektor pertanian meningkat 0,030 persen, *ceteris paribus*.

Dilihat dari nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari satu, subsidi bersifat inelastis terhadap perkembangan ekonomi. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 0,013 yang lebih kecil dibandingkan t-tabel ( $\alpha$  10 % = 1,761). Hal ini berarti bahwa variabel subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

Maipita, *et al* (2010)<sup>34</sup> dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peningkatan subsidi sektor pertanian menghasilkan penurunan harga pada sektor tambang dan galian; manufaktur; dan listrik, gas, dan air. Dampak peningkatan subsidi pada kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan, khususnya di area perdesaan.

Dampak peningkatan transfer pendapatan kepada rumah tangga perdesaan menunjukkan hasil campuran pada output, harga output, dan permintaan tenaga kerja. Peningkatan pendapatan meningkatkan permintaan output. Karena permintaan input tenaga kerja adalah turunan permintaan, maka ada peningkatan permintaan tenaga kerja. Transfer pendapatan dari pemerintah kepada rumah tangga perdesaan berpengaruh positif terhadap utilitas, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga. Telah ditemukan fakta bahwa tingkat utilitas, pendapatan riil, dan pengeluaran rumah tangga perkotaan mengalami penurunan. Kebijakan transfer pendapatan menurunkan angka kemiskinan secara langsung khususnya di daerah perdesaan. Hal ini dapat dilihat dengan melihat seluruh indikator kemiskinan seperti *head count index*, *poverty depth*, and *poverty severity* yang telah meningkat, terkecuali rumah tangga perkotaan.<sup>35</sup>

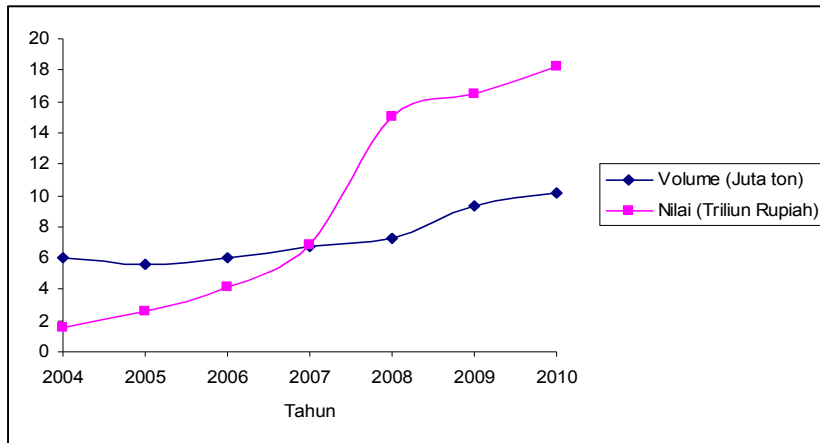
Terkait dengan subsidi input (terutama pupuk) yang diberikan kepada petani untuk meringankan biaya produksi, jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan subsidi pupuk sebesar Rp 16,46 triliun (untuk produsen pupuk) atau total sekitar Rp 17,5 triliun (untuk kekurangan pembayaran 2007, pengawasan dan Bantuan Langsung Pupuk). Pada tahun 2010, subsidi akan dilanjutkan dengan pagu anggaran (definitif) sebesar Rp 11,29 triliun.

---

<sup>34</sup> Maipita, I., M.D. Jantan, dan N.A.A. Razak, *loc. cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

**Gambar 8. Perkembangan Volume dan Nilai Subsidi Pupuk di Indonesia Tahun 2004 – 2010**



Sumber: Kementerian Pertanian, 2011.

Ellis (1988)<sup>36</sup> mengidentifikasi tujuh mekanisme yang menyebabkan petani selalu kalah dan tersingkirkan, yaitu 1) *rent in labour services*, dimana hal ini menggambarkan adanya kesulitan petani untuk mendapatkan akses terhadap jasa tenaga kerja; 2) *rent in kind*, misalnya sewa bagi hasil yang dalam prakteknya menunjukkan kedaulatan tuan tanah dalam memutuskan porsi bagi hasil; 3) *rent in cash*, dimana petani harus menyewa secara tunai untuk mendapatkan akses mengolah lahan; 4) *appropriation of surplus value via the wage*, dimana terdapat pengambilan surplus atas produksi dengan pemberian upah sangat kecil; 5) *appropriation via prices*, dimana petani dirugikan akibat harga output yang turun di pasaran atau harga input yang membumbung, atau akibat keduanya sekaligus; 6) *appropriation via usury*, dimana pendapatan petani direnggut akibat tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar dari harga pasar nasional maupun internasional; 7) *peasant taxation*, dimana negara biasanya memajaki secara tidak langsung terhadap produk pertanian. Pajak ekspor untuk komoditas pertanian misalnya, merupakan mekanisme umum yang menyebabkan terjadinya transfer pendapatan dari petani ke negara.

<sup>36</sup> Ellis, F. 1988. *Peasant Economics Farm Households and Agrarian Development*.

### g. Dummy Variabel Kondisi Perekonomian

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini berarti bahwa terjadinya perubahan kekuasaan di Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan PDB sektor pertanian. Nilai koefisien regresi *dummy* variabel kondisi perekonomian sebesar  $-0,138$  berarti bahwa setelah terjadinya perubahan kekuasaan di Indonesia menyebabkan penurunan PDB sektor pertanian sebesar  $0,138$ , *ceteris paribus*. Dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai  $-9,554$  yang lebih kecil dibandingkan t-tabel ( $\alpha 1\% = 2,977$ ). Hal ini menunjukkan bahwa *dummy* variabel kondisi perekonomian berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian pada tingkat kepercayaan  $99\%$  atau  $\alpha 1\%$ .

## B. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari multikolinearitas dan autokorelasi. Dengan pembahasan sebagai berikut.

### a. Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam model estimasi dilakukan dengan melihat  $R^2$  yang dihasilkan dari estimasi model. Kriteria keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai  $R^2_{yx} < R^2_{xx}$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.
2. Jika nilai  $R^2_{yx} > R^2_{xx}$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.

Hasil dari uji koefisien regresi secara parsial disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Multikolinearitas**

	Variabel		Nilai $R^2$
LogPE	= f(LogGA, LogMS, LogTE, LogER, LogS, DM)	(Model 1)	0,9954
LogGA	= f(LogMS, LogTE, LogER, LogS, DM)	(Model 2)	0,9711
LogMS	= f(LogGA, LogTE, LogER, LogS, DM)	(Model 3)	0,9786
LogTE	= f(LogGA, LogMS, LogER, LogS, DM)	(Model 4)	0,9747
LogER	= f(LogGA, LogMS, LogTE, LogS, DM)	(Model 5)	0,9767
LogS	= f(LogGA, LogMS, LogTE, LogER, DM)	(Model 6)	0,9581
DM	= f(LogS, LogER, LogTE, LogMS, LogGA)	(Model 7)	0,9429

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) regresi parsial Model 1 lebih besar dari nilai koefisien determinasi regresi Model 2 sampai Model 7. Nilai koefisien regresi uji parsial tidak ada yang lebih besar dari nilai koefisien regresi model 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak ditemukan masalah multikolinearitas.

#### b. Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model estimasi ini dilakukan uji *Lagrange Multiplier Test* (LM Test). Hasil dari uji ini ditampilkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test**  
*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:*

F-statistik	0.119130	<i>Probability</i>	0.888822
Obs*R-squared	0.402814	<i>Probability</i>	0.817579

Hasil uji LM di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai  $X^2_{hitung}$  (Obs\*R-squared) = 0,4028 dengan *probability* 0,8175 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi tidak dapat ditolak, artinya dalam model yang diestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial (autokorelasi) antar faktor pengganggu.

#### C. Kebijakan Lain

Selain kebijakan makro ekonomi, perlu ada kebijakan lain yang saling terkait. Arifin (2004b)<sup>37</sup> menyebutkan bahwa dukungan pemerintah dalam hal penelitian dan pengembangan pertanian amat vital dalam reposisi dan rekonstruksi sektor pertanian. Alokasi anggaran pemerintah untuk penelitian sangat kecil atau yang terkecil dibandingkan alokasi dana riset negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dengan keunggulan keanekaragaman hayati yang besar, Indonesia seharusnya mampu menjadi terdepan apabila didukung oleh pembiayaan pertanian. Selain itu,

---

<sup>37</sup> Arifin, 2004b, *op cit.*

dukungan dan pemihakan pemerintah dalam bentuk subsidi masih amat diperlukan, sepanjang tidak menimbulkan distorsi akut dan ketidaktepatan sasaran.

Selain kebijakan fiskal dan moneter, semestinya dilakukan juga berbagai bentuk kebijakan yang berpihak kepada petani, yaitu<sup>38</sup> 1) fokus pada prioritas menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, 2) investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan di perdesaan guna meningkatkan produktivitas dan mobilitas, 3) membuat migrasi kota ke desa menjadi lebih mudah, 4) melakukan reformasi perdagangan global yang membuat perdagangan hasil pertanian lebih menguntungkan, 5) melakukan investasi besar-besaran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor pertanian, 6) meningkatkan produktivitas pengembangan "*orphan crops*" yang memiliki hasil tinggi bagi petani, 7) mengembangkan pembiayaan lokal dan mekanisme perencanaan bagi investasi infrastruktur di perdesaan.

## V. Penutup

### A. Simpulan

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian. Sedangkan jumlah uang beredar dan subsidi berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian. Pajak, tingkat suku bunga, dan kondisi perekonomian berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian.
2. Dari model estimasi diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,9954 berarti secara keseluruhan variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, jumlah uang beredar, pajak, tingkat suku bunga, dan subsidi mampu menjelaskan variasi PDB sektor pertanian sebesar 99,54 persen selama kurun waktu yang diteliti.
3. Variabel tingkat suku bunga, pajak, dan *dummy* variabel kondisi perekonomian berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian, sedangkan jumlah uang beredar dan subsidi tidak berpengaruh signifikan.

---

<sup>38</sup> Timmer, P. 2008. "Agriculture and Pro-Poor Growth: An Asian Perspective". *Asian Journal of Agricultural and Development*. Vol. 5, No. 1, (June 2008), Pp. 1 – 28.

4. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini berarti bahwa terjadinya perubahan kekuasaan di Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan PDB sektor pertanian.

#### **B. Rekomendasi**

1. Kebijakan makro ekonomi yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah adalah penurunan tingkat suku bunga dan subsidi bagi petani skala usaha mikro dan kecil. Hal ini dilakukan agar tidak membebani anggaran pemerintah.
2. Dalam penelitian lanjutan terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan fiskal dan moneter, agar mendisageragasi: 1) tenaga kerja non-pertanian, 2) tenaga kerja sektor pertanian, 3) upah tenaga kerja, 4) inflasi, dan 5) tarif impor.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Amang, B. dan M. H. Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*. Edisi Kedua: direvisi dan diperluas. Penerbit IPB Press. Bogor.
- Arifin, B. 2004a. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004b. “Menterjemahkan Keberpihakan Terhadap Sektor Pertanian: Suatu Telaah Ekonomi Politik” *dalam* “Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian: Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan”. Perhepi.
- Dornbusch, R., S. Fischer, and R. Sartz. 1998. *Macroeconomics*. Seventh Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. Boston.
- Mankiw, G. 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Samuelson, P. A. and W. D. Nordhaus. 1992. *Economics*. 14<sup>th</sup> edition. McGraw-Hill, Inc., New York.
- Stiglitz, J. E. 1997. *Economics*. Second Edition. W.W. Norton & Company. New York.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Wijaya, M. F. 2000. *Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro*. Edisi 3. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

### Jurnal:

- Anthony, E. 2010. “Agricultural Credit and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Analysis”. *Business and Economics Journal*, Volume 2010.
- Ashari. 2009. “Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia”. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 7 No. 1, (Maret 2009), hal. 21 – 42.
- Darsono, M. Tambunan, H. Siregar, dan D. S. Priyarsono. 2008. “Analisis Keefektifan Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan

- Penekanan Agroindustri di Indonesia". *Forum Pascasarjana IPB*. Bogor. Vol. 31 No. 3, (Juli 2008), hal 2001-2014.
- Huang, J., S. Rozelle, and H. Wang. 2006. "Fostering or Stripping Rural China: Modernizing Agriculture and Rural to Urban Capital Flows". *The Developing Economies*. Vol. XLIV No. 1, (March 2006), Pp. 1 – 26.
- Ilham, N., dan H. Siregar. 2007. "Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 25 No. 1, (Mei 2007), hal. 55 – 83.
- Maipita, I., M. D. Jantan, dan N. A. A. Razak. 2010. "Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, April 2010.
- Mustafa, U., W. Malik, and M. Sharif. 2001. "Globalisation and Its Implications for Agriculture, Food Security and Poverty in Pakistan". *The Pakistan Development Review*. Vol. 40 No. 4, Part II (Winter 2001), Pp. 767–786.
- Onoja, A. O., and Agumagu A. C. 2009. "Econometric Modeling of The Effects of Economic Policies on Food Output in Nigeria Under Obasanjo's Administration". *Journal of Sustainable Development in Africa*. Vol. 11 No. 1, Pp. 98 – 112.
- Saptana dan P. U. Hadi. 2008. "Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi dan Promosi terhadap Ekonomi Hortikultura Indonesia". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 26 No. 1, (Mei 2008), hal. 21 – 46.
- Simorangkir, I., dan J. Adamanti. 2010. "Peran Stimulus Fiskal dan Pelonggaran Moneter pada Perekonomian Indonesia Selama Krisis Finansial Global: Dengan Pendekatan *Financial Computable General Equilibrium*". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Oktober 2010.
- Timmer, P. 2008. "Agriculture and Pro-Poor Growth: An Asian Perspective". *Asian Journal of Agricultural and Development*. Vol. 5 No. 1, (June 2008), hal. 1 – 28.
- Yusdja, Y., E. Basuno, M. Ariani, dan T. B. Purwantini. 2004. "Analisis Peluang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Petani Melalui Pengelolaan Usahatani Bersama". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 22 No. 1, (Mei 2004), hal. 1 – 25.

Yustika, A. E. 2007. "Pedesaan, Pertanian, dan Modal: Tinjauan Ekonomi Kelembagaan". *Jurnal Ekonomi Indonesia*. No. 2, (Desember 2007), hal. 1 – 14.

**Laporan:**

Cho, G. D., M. K. Kim, E. Sun, H. Jin, W. W. Koo, 2003. "Nominal Exchange Rate Misalignment: Is It Particularly Important to Agricultural Trade?" *Agribusiness and Applied Economics Report*, No. 516, August 2003.

Syukur, M., H. Mayrowani, Sunarsih, Y. Marisa, M. Fauzi Sutopo. 2000. *Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

United Nations. 2010. *The Least Developed Countries Report 2010: Towards a New International Development Architecture for LDCs*. New York and Geneva.

**Makalah:**

Daryanto, A. 2009. *Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatannya*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani, Bogor, 14 Oktober 2009.

**Disertasi:**

Asnawi. 2005. *Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

**Tesis:**

Sefrarita, C. 2005. *Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. Sumatera Utara.

